



**MEMBANGUN KEDEWASAAN BERPOLITIK
WARGA MASYARAKAT AKADEMIS MELALUI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Bali Widodo✉

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima November 2017
Disetujui Desember 2017
Dipublikasikan Januari 2018

Keywords:

*Political Maturity, University
Students, Citizenship Education*

How to Cite:

Bali Widodo (2018).
Membangun Kedewasaan
Berpolitik Warga Masyarakat
Akademis Melalui Pendidikan
Kewarganegaraan: Jurnal
Pancasila dan
Kewarganegaraan Universitas
Muhammadiyah Ponorogo, Vol
3 No 1 : Halaman 70 - 78

Abstrak

Kematangan mahasiswa dan akademisi di Bandung masih belum cukup baik. Ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat menerima perbedaan politik atau menyampaikan aspirasi politik mereka dengan baik. Mereka terkadang menyampaikan niat politik mereka dengan melakukan tindakan anarkis. Dengan cara ini akan membawa bahaya persatuan negara kita karena mahasiswa merupakan bagian dari masa depan negara kita. Mengacu pada kasus ini, perlu membuat mahasiswa menjadi orang-orang yang memiliki kematangan politik yang memadai. Materi pendidikan demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan cara solutif agar mahasiswa melakukan tindakan politik yang sopan. Penerapan nilai demokrasi dapat membantu siswa untuk memiliki kedewasaan politik.

Abstract

The maturity of university students and academic people in Bandung is still not good enough. There are some university students who can't accept the political difference or deliver their political aspirations well. They sometimes deliver their political intentions by doing anarchic actions. This way will lead to the danger of our country's unity since university student is the part of our country's future. Referring to this case, it is necessary to create the university students into the persons that have adequate political maturity. The material of democracy education in citizenship education is the solutive way to ask the university students to do polite political actions. The implementation the democracy values can help the students to have political maturity.

PENDAHULUAN

Sejarah membuktikan bahwa mahasiswa memiliki peran yang besar terhadap perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negaranya. Mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan kampus merupakan *agent of change* yang senantiasa melakukan perubahan-perubahan menuju arah yang lebih baik. Mahasiswa sering terlibat dalam masalah sosial ekonomi masyarakat, penegakkan hukum serta hak asasi manusia seperti misalnya melakukan berbagai aksi seperti misalnya membantu para korban bencana alam dengan melakukan aksi penggalangan dana, melakukan aksi demo untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum terkait dengan kebijakan pemerintah yang dirasa memberatkan rakyat kecil. Pasca reformasi bergulir pada tahun 1998 yang lalu, kebebasan dalam menyampaikan pendapat ini seolah tidak ada lagi yang membatasinya. “Kran” demokrasi dibuka lebar, orang tidak merasa takut lagi sekarang dalam menyampaikan aspirasi maupun orasi politiknya. Namun demikian hal ini tidak berarti berbanding lurus dengan proses berdemokrasinya. Perbedaan dalam politik yang berakhir kepada anarkhisme ini menandakan gaya politiknya yang masih belum dewasa. Mahasiswa seharusnya berperan lebih aktif lagi dalam berbagai persoalan, terutama yang menyangkut persoalan bangsa. Fungsi kontrol selama ini sudah ditunjukkan oleh mahasiswa. Masyarakat memang berharap banyak terhadap penanganan permasalahan yang mereka hadapi kepada mahasiswa. Karenanya tak berlebihan jika banyak harapan dan tanggung jawab yang dipikul oleh mahasiswa.

Banyaknya kebijakan pemerintah yang cenderung memberatkan ekonomi rakyat, terkadang menggerakkan mahasiswa untuk merespon kebijakan tersebut dengan

melakukan aksi unjuk rasa di muka umum. Menyampaikan pendapat di muka umum ini tentunya tidak salah karena dijamin oleh undang-undang.

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di segala bidang kehidupan nasional, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama.

Dalam bidang politik, sepak terjang mahasiswa ini tidak usah diragukan lagi, bagaimana mahasiswa mempunyai andil yang besar dalam melengserkan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun sekaligus membawa bangsa ini memasuki era reformasi. Mahasiswa berpolitik tentu tidak salah, karena semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya keterlibatan mahasiswa dalam berpolitik dijamin secara konstitusional.

Permasalahannya adalah ketika dalam menyampaikan pendapatnya itu terkadang dilakukannya dengan aksi anarkhis misalnya dengan melakukan pengrusakan terhadap berbagai fasilitas umum, ataupun berakhir bentrokan dengan aparat keamanan.

Melihat fenomena tersebut perlu kiranya untuk meningkatkan kedewasaan berpolitik warga masyarakat akademis dalam hal ini mahasiswa agar hal-hal yang berkenaan dengan anarkhisme tidak terjadi lagi

PEMBAHASAN

Kedewasaan atau dewasanya seseorang tidak ada kaitannya dengan usia. Ada orang yang usianya sudah tua tetapi cara berpikir dan sikapnya belum dewasa, namun ada juga orang yang masih berusia remaja cara berpikir dan sikapnya menunjukkan kalau dia sudah dewasa. Seseorang dikatakan dewasa antara lain ketika dirinya mampu menerima ketidaknyamanan,

bijaksana, tidak emosional, tidak suka berbuat onar, dan memiliki karakter yang baik.

Menurut Wulandari, mahasiswa yang berkarakter adalah (1) berkarakter sebagai seorang pembelajar, yang haus akan ilmu pengetahuan dan kebenaran, intelektual yang senantiasa berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan fenomena sosial maupun alam yang terjadi, yang tunduk patuh pada etika akademik dan ilmu pengetahuan, yang sadar akan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademiknya secara beradab dan bertanggungjawab, serta sadar akan tanggung jawab moralnya untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan bagi sebesar-besarnya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. (2) mahasiswa merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya kesadaran akan eksistensi formalnya tersebut harusnya telah terinternalisasi sebagai karakter mahasiswa, sehingga mahasiswa secara sadar menjadi bagian dari upaya sadar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi/golongan, taat azas terhadap konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, serta bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negaranya. (3) mahasiswa merupakan anak bangsa yang menjadi bagian dari masyarakat. Mahasiswa merupakan representasi dari rakyat baik dalam konteks kekinian maupun masa depan. Dan mahasiswa adalah duta para orang tua, yang diutus oleh orang tuanya untuk menjalankan misi pribadi dan keluarga. Mahasiswa harus tetap menjadi bagian dari masyarakat, mampu berempati terhadap segenap persoalan masyarakat, serta menjadi bagian produktif untuk meretas jalan keluar terhadap persoalan-persoalan tersebut. Karenanya diperlukan

karakter mahasiswa yang kritis sekaligus empatif dalam menyuarakan kehendak masyarakatnya, serta kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat yang notabene merupakan orang tua yang mengutus mereka sebagai duta.

(4) mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat dunia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kesadaran akan kebhinekaan ini merupakan karakter dasar guna membangun sikap toleran, saling menghormati, dan humanis guna dapat bekerjasama secara sinergis dalam mewujudkan tatanan masyarakat dunia yang adil dan sejahtera. (5) mahasiswa merupakan insan yang tak boleh terpentol jauh dari eksistensi transedentalnya sebagai makhluk Tuhan yang membawa misi kenabian guna dapat menjadi khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kesejahteraan semua makhluk yang ada di muka bumi. Karenanya, mahasiswa haruslah pribadi-pribadi yang taat dalam menjalankan ibadah formalnya serta mampu mewujudkan hakikat ibadah yang dijalannya tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Kelima kesadaran eksistensial inilah yang harusnya menjadi landasan dalam membangun paradigma dan metoda dalam melakukan pembinaan karakter mahasiswa, sehingga internalisasi akan dimensi aksiologis dan eksistensinya itu dapat berlangsung secara alamiah dan manusiawi. Tentu bukan proses yang mudah, apalagi dalam wadah organisasi perguruan tinggi yang kompleks dan seringkali terkendala oleh kultur birokrasi yang lambat, inefisien, dan formalistik.

Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Perspektif lain mengatakan bahwa politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara,

atau sesuatu yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

Pertanyaannya, apakah mahasiswa boleh berpolitik? Politik dan mahasiswa tidak bisa dipisahkan karena pada dasarnya manusia adalah makhluk politik atau zoon politicon. Di dalam kampus mahasiswa sebenarnya sudah berpolitik, hal ini tampak misalnya saat diadakan pemilihan Ketua Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Himpunan, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa dan lain-lain. Di luar kampus, mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan usia dapat menjadi anggota dari sebuah partai politik. Namun demikian tidak sedikit pula mahasiswa yang tidak peduli politik, acuh tak acuh dengan masalah politik, bahkan sebagian mahasiswa ada yang mengatakan politik itu licik dan kotor. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa mestinya mempunyai peran yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Mahasiswa sebagai agen perubahan "*agent of change*", hampir semua perubahan politik yang terjadi di negara ini dilakukan oleh mahasiswa. Perubahan yang terjadi di negara ini memang sangat memerlukan peran mahasiswa, dapat dikatakan mahasiswa sebagai inisiator perubahan.

Namun demikian, gerakan berpolitik mahasiswa saat ini kerap ditunjukkan dengan gerakan aksi demonstrasi turun ke jalan dan tidak sedikit juga diakhiri dengan tindakan anarkhi seperti merusak infra struktur yang ada, membakar ban di tengah jalan, menghambat para pengguna jalan yang lain. Ada juga yang beranggapan bahwa gerakan mahasiswa ini ada yang menggerakkannya, dan hanya untuk kepentingan suatu kelompok atau golongan saja.

Terkait hal tersebut, sebaiknya mahasiswa sebelum melaksanakan hak-hak politiknya harusnya dibekali terlebih dahulu dengan pendidikan politik agar tingkat

kedewasaan berpoliticnya lebih dewasa sehingga dalam menyampaikan aspirasinya tidak dengan cara anarkhis.

Kedewasaan berpolitik mahasiswa sebagai warga masyarakat akademis ini dapat dibangun melalui pendidikan kewarganegaraan yang menjadi salah satu mata kuliah wajib umum di Perguruan Tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib umum, artinya wajib dimuat dalam kurikulum setiap perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang calon sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis.

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan untuk menjadikan warga

negara yang demokratis dan bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi yang merupakan salah satu materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di negara yang menganut sistem demokrasi merupakan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan dari sejak awal secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Hal ini jangan sampai ada penyalahgunaan demokrasi yang dapat berujung pada perilaku anarkhi. Menurut Djiwandono dkk (2003: 41):

...bila demokrasi tidak disertai oleh tatanan politik dan aturan politik serta hukum yang jelas, suatu kondisi tertentu bisa berubah menjadi anarkhisme dan bahkan kemudian mengundang otorianisme yaitu suatu pemerintahan yang menindas dan berlawanan dengan prinsip demokrasi.

Sementara menurut Tilaar (1999: 172-174) bahwa :

Pendidikan demokrasi yang merupakan tuntutan dari terbentuknya masyarakat madani Indonesia mengandung berbagai unsur, a) manusia memerlukan kebebasan berpolitik artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri; b) kebebasan intelektual; c) kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri (self realization); d) pendidikan yang mengembangkan kepatuhan moral kepada kepentingan bersama dan bukan kepentingan sendiri atau kelompok; e) pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda (the right to be different) percaya kepada kemampuan manusia untuk membina masyarakat di masa depan.

Dari tingkatan Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi mata kuliah yang

memiliki visi dan misi yang jelas sebagai pendidikan demokrasi adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Winataputra dkk (2004:2), bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi.

Kemudian Winataputra dkk (2004: 3) mengemukakan bahwa :

“Secara keseluruhan PKn memiliki fungsi yang strategis untuk mewujudkan esensi tujuan pendidikan nasional membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”

Menurut Lemhanas, dalam praktik Pendidikan Kewarganegaraan juga mengemban misi yang lain yaitu sebagai : (1) pendidikan kewarganegaraan dalam arti kata sesungguhnya yaitu civic education, yang bertugas membina dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang berkenaan dengan peranan, tugas, hak, dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara; (2) pendidikan nilai dan karakter yang bertugas membina dan mengembangkan nilai-nilai bangsa yang dianggap baik sehingga terbentuk warga negara yang berkarakter baik; (3) pendidikan bela negara yang bertugas membentuk mahasiswa agar memiliki kesadaran bela negara sehingga dapat diandalkan untuk menjaga kelangsungan negara dari berbagai ancaman.

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk

membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (*global society*) yang cerdas.

Pendidikan Kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional.

Metode pembelajarannya lebih kepada student center learning, memberi kesempatan lebih banyak dalam berdialog atau berdiskusi kepada mahasiswa supaya lebih aktif di kelas. Dengan demikian mahasiswa akan lebih memahami lagi betapa besar perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

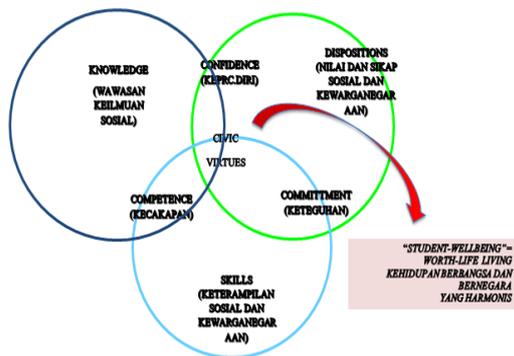
Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi masa depan memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tercakup dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan Kewarganegaraan, akan lebih baik lagi jika Pendidikan ini di manfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat kita tidak akan mudah goyah dengan iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Selain itu kita tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Memiliki sikap tersebut tentu tidak bisa kita peroleh begitu

saja tanpa belajar. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting manfaatnya, maka di masa depan harus segera dilakukan perubahan secara mendasar konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para mahasiswa akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakan sebaik-baiknya dengan cara demokratis dan juga terdidik.

Nilai-nilai yang selama ini dianggap baik yang dimiliki bangsa Indonesia juga sudah mengalami pergeseran. Hal ini juga yang membuat seolah-olah mahasiswa sudah kehilangan nilai-nilai luhur bangsa ini. Menurut Nabila Naradja Lazuardi, pergeseran nilai ini dapat terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah pengaruh dari adanya globalisasi yang masuk kedalam bangsa kita. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang bersumber dari bangsa Indonesia sendiri. Contoh dari faktor eksternal adalah globalisasi yang di semangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Munculnya sistem baru seperti ini mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global. Masuknya nilai dan system-sistem baru dari luar seperti ini menyebabkan terjadinya loncatan atau pergeseran dalam sistem tata nilai. Muncul suatu keraguan untuk menerima nilai-nilai baru tersebut atau mempertahankan nilai-nilai dasar yang dipegang oleh negara kita. Sedangkan contoh dari faktor internal adalah faktor yang bersumber dari bangsa Indonesia sendiri. Hal seperti ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman seorang warga negara dalam memahami Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sebuah alat legitimasi kekuasaan Orde Baru yang tidak dapat menyelesaikan krisis yang sedang

dihadapi oleh negara. Pemikiran seperti ini membuat semakin banyak orang yang menganggap remeh Pancasila, bahkan menjadi anti Pancasila. Kesalahpahaman seperti ini menjadikan masyarakat telah kehilangan sumber dan sarana orientasi terhadap nilai sikap anti Pancasila seperti ini dapat menimbulkan masalah baru dalam masyarakat, yaitu berkurangnya sikap nasionalisme.

Winataputra, menjelaskan capaian pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan bermuara pada terlembagakannya *civic virtue* dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, yang dilakukan dengan mengembangkan mengembangkan *civic knowledge, civic skill dan civic disposition* sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1
Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

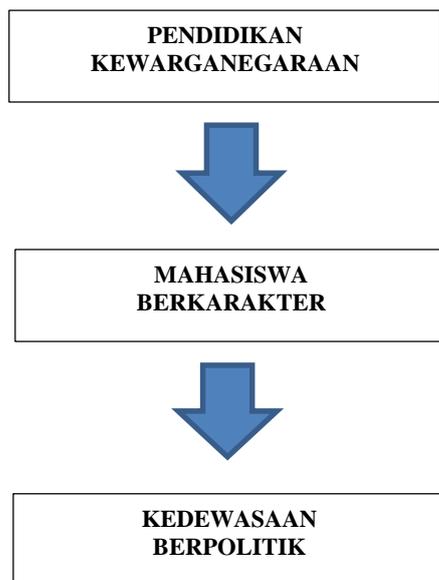
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat dalam diri mahasiswa akan tertanam nilai-nilai seperti; menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam berbagai aspek kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hukum; mengamalkan sikap toleransi antarumat beragama dan kepercayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; mengamalkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia; mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dan sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, juga bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara agar menjadi warga dunia (*global society*) yang cerdas.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan ini mahasiswa diingatkan lagi bahwa bangsa Indonesia dibangun atas keberagaman etnis, budaya dan agama. Sehingga harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik. Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tercakup dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh Pendidikan

Kewarganegaraan, akan lebih baik lagi jika Pendidikan ini dimanfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat mudah goyah dengan iming-iming kejayaan yang sifatnya hanya sementara. Selain itu tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-nilai yang berlaku di negara Indonesia. Memiliki sikap tersebut tentu tidak bisa diperoleh begitu saja tanpa belajar. Oleh karena Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting manfaatnya, terutama dalam proses membangun kedewasaan dalam berpolitik warga masyarakat akademis maka di masa depan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus ditingkatkan.



Gambar 2.

Proses menuju kedewasaan berpolitik warga masyarakat akademis

Kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini antara lain agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan

komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai, agar mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal, agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi, agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik, agar mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara bijak (berkeadaban).

KESIMPULAN

Sikap dan perilaku mahasiswa pada saat menggunakan hak politiknya yang terkadang berujung pada tindakan anarkis menandakan sikap mentalnya yang belum dewasa. Namun demikian, kedewasaan berpolitik ini tidaklah ditentukan dari berapanya usia seseorang. Seseorang yang telah berusia lanjutpun masih ada yang sikap dan perilakunya belum dewasa. Mahasiswa sebagai warga masyarakat akademis, calon pemimpin bangsa, tentunya harus memiliki sikap dan perilaku yang dewasa.

Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan pada perguruan tinggi memuat materi ajar yang berhubungan erat dengan pembentukan sikap dan kepribadian mahasiswa yang berkarakter, memiliki budi pekerti, etika dan moral yang baik serta perilaku cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat menjadi sarana pembentukan karakter untuk menjadikan mahasiswa sebagai warga negara yang baik, cerdas dan dewasa dalam berpolitik, sehingga dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat membangun kedewasaan berpolitik warga masyarakat akademis.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah tetap menjadikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum di semua tingkat pendidikan, dan melakukan pengawasan secara terus menerus terkait pelaksanaan proses belajar mengajar matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini di setiap perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahadi, Muhammad. 2017. *Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara*. Medan: Prosiding Semnas Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Budimansyah, D. (2012). *Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D & Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan
- Cogan, John J and Ray Derricot. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective of Education*. London: Kogan Page.
- Lemhanas, Pendidikan Kewarganegaraan.
- Miriam Budiardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Winarno, 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winataputra, U.S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung : Widya Aksara Press
- Winataputra, Udin S dan D. Budimansyah. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Internet :
<http://dodisupandiblog.blogspot.co.id/2010/09/pengertian-pendidikan-demokrasi.html>
<https://www.educenter.id/pendidikan-kewarganegaraan/>
<https://konsultankti.wordpress.com/2015/05/18/kedewasaan/> Nabila Naradja Lazuardi, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pengembangan Kepribadian
Wulandari, diunduh dalam <http://kelompok2abb.blogspot.co.id/2012/12/mengapa-mahasiswa-harus-berkarakter.html>